Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN 1410-4946
Volume 12, Nomor 2, November 2008 (121 - 256)

Polling sebagai Ekspresi Opini Publik, Pilar Kelima Demokrasi?

Wisnu Martha Adiputra[1]

Abstract

Public opinion is one of important elements of democracy. Public opinion is considered as fifth estate of democracy. This paper examines public opinion concept and its position as fifth estate of democracy. It also tries to explore the challenges of public opinion as important factor for democratic political communication in Indonesia. It argues that the absence of public in political communication makes public opinion uneasy to become the fifth estate. This paper acknowledges the importance of public opinion in Indonesian democracy. Moreover, this paper explains how far public opinion draws Indonesian democracy.

Kata-kata kunci: *opini publik, pilar kelima, polling dan demokrasi*

Pengantar: Pada Mulanya adalah Suara Rakyat

Dalam menilai proses Reformasi Indonesia yang terjadi kurang lebih sepuluh tahun yang lalu, para ahli berada dalam dua kutub argu-

[1] *Wisnu Marta Adiputra* adalah staf pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia bisa dihubungi melalui email: wisnumartha@yahoo.com atau wisnumartha14@gmail.com.

men yang berseberangan. Argumen pertama menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan dalam berdemokrasi. Argumen ini terutama muncul pada masa awal Reformasi di mana optimisme merebak di seluruh lapisan masyarakat. Pada saat itu optimisme merebak hampir di semua elemen, terutama elemen masyarakat sipil.[2]

Argumen kedua menilai demokrasi Indonesia tidak mengalami kemajuan yang berarti. Demokrasi tidak hanya jalan di tempat tetapi juga mengalami langkah mundur. Kebebasan berekspresi dan berpendapat memang mengalami kemajuan, begitu pula kebebasan untuk memilih pemimpin. Walau demikian, hal tersebut adalah sesuatu yang tampak di permukaan. Berbagai hal yang esensial di dalam demokrasi, misalnya partisipasi otentik, transparansi, dan kemampuan menerima perbedaan, serta kemampuan mengelola konflik, belumlah mengalami kemajuan.

Argumen kedua ini bahkan menilai agenda reformasi utama pada tahun 1998, yaitu: mengadili KKN Soeharto, keluarga, dan kroni; mengadili pelanggaran HAM berat dari tahun 1965, Timor Timur, Aceh, Papua, 27 Juli, hingga Trisakti 13-14 Mei 1998, Semanggi I-II; mencabut dwi-fungsi ABRI dan praktiknya di politik, bisnis dan territorial; membubarkan atau menegakkan hukum lustrasi terhadap lembaga negara dan individu dari partai politik Orba antidemokrasi; dan amandemen total dan progresif dari UUD 1945 menjadi konstitusi demokratis, hanya menghasilkan perubahan semu atau dalam istilah Samuel P. Huntington, *transformation*. Transformasi berarti elite lama menjadi pelaku utama dalam sistem politik yang baru.[3] Sebuah tipe yang dianggap buruk dari proses transisi politik.

Di luar kedua kutub penilaian tersebut, sebagian masyarakat Indonesia semakin menyadari bahwa suara masyarakat semakin dihargai dan didengar oleh pejabat publik, juga oleh seluruh aktor politik. Suara rakyat sudah dianggap sebagai pijakan paling penting bagi semua aktivitas politik. Suara rakyat menjadi "alat pembenar" dan rujukan paling akhir bagi semua tindakan politis para aktor politik. Konsep suara masyarakat yang

---

[2] Optimisme akan proses demokratisasi muncul pada masa awal Reformasi. Lebih jauh lihat Geoff Forrester (ed.) (1999). *Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos*. Singapore: ISEAS.

[3] M. Fajroel Rachman. "Selamat Tinggal Reformasi 1998". *Kompas*, Selasa 13 Mei 2008.

makro ini kemudian mengerucut menjadi sebuah konsep yang secara generik kita kenal dengan nama opini publik.

Opini publik menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam realitas politik di Indonesia saat ini. Seorang kandidat pemimpin daerah misalnya, perlu untuk memperhatikan hasil *polling* atau jajak pendapat sebelum mengikuti pemilihan kepala daerah. Contoh lain adalah bagaimana masyarakat mulai berani menyampaikan opininya melalui media massa dan berdemonstrasi secara langsung. Walau kita telah memahami opini publik, kita masih memiliki kekurangan dalam menerjemahkannya. Salah satu kekurangan tersebut adalah menganggap demonstrasi sebagai bentuk ekspresi yang utama atau bahkan satu-satunya dari opini publik. Sebenarnya banyak bentuk lain mengekspresikan dan mengetahui opini publik walau *polling* adalah bentuk ekspresi yang paling dipercaya sekarang ini.

Tulisan ini mencoba mengeksplorasi konsep opini publik dan posisinya sebagai pilar kelima di dalam demokrasi sebagai awal. Kemudian tulisan ini akan mencoba melihat kesulitan opini publik menjadi faktor penting bagi proses komunikasi politik yang demokratis. Proses komunikasi politik yang lebih berpihak kepada media dan aktor politik dengan mengabaikan suara masyarakat adalah isu penting pada bagian ini. Akhirnya, pada bagian penutup, tulisan ini akan melihat sejauh mana peran opini publik dan saran agar opini publik lebih berdayaguna bagi demokrasi di Indonesia.

Mengeksplorasi Konsep Opini Publik

Opini publik dapat dilacak dalam semua aktivitas kehidupan bersama seorang individu. Diskusi permasalahan kehidupan bersama, terutama isu-isu publik selalu ada dalam sejak manusia memulai hidup masyarakat. Mulai dari komunikasi interpersonal sampai dengan komunikasi massa. Setiap orang akan mendiskusikan permasalahan mulai dengan orang-orang terdekat sampai dengan mengirmkan opini ke media massa.

Diskusi tersebut awalnya berada di dalam kelompok. Semua isu terlebih dulu hadir di dalam kelompok, mulai dari kelompok kecil seperti keluarga sampai kelompok yang kompleks seperti asosiasi profesi dan kelompok penekan. Mulai dari kelompok yang tidak memahami isu sepe-

nuhnya, sampai dengan kelompok yang ahli atau sangat paham dengan isu tertentu. Ragam diskusi terhadap isu tersebut menggunakan wahana komunikasi tertentu. Proses diskusi juga seringkali diintensifkan oleh informasi yang tidak tepat atau dengan kontroversi dan konflik.

Pada era kontemporer sekarang ini, seorang individu mendapatkan setumpuk informasi mengenai sebuah isu. Dia akan berusaha menentukan informasi tertentu yang sesuai dengan isu serta menyesuaikan dengan konteks yang lebih luas. Dia akan mengumpulkan informasi dari beragam media, yang pada saat ini hampir tak terbatas. Pada era sekarang diskusi dalam tiap kelompok mengenai sebuah isu mengalami penguatan dan percepatan yang luar biasa.

Masalah benar dan salah dalam opini publik bukanlah hal penting. Opini dapat berbasis dari kepercayaan individu yang belum tentu benar dan sesuai dengan realitas. Asumsi lain adalah terdapat kecenderungan bahwa individu akan mengubah opininya bila mendapatkan informasi yang akurat. Kenyataannya, individu belum tentu melakukan perubahan opini sekalipun ia mendapatkan informasi yang akurat. Karakter ini sejalan dengan definisi opini publik yang disampaikan oleh F. Pollock bahwa opini adalah *the content of a person's consciousness, without any judgement as to its truth or untruth.*[4]

Istilah opini publik sendiri pertama kali digunakan oleh politisi Inggris Sir Robert Peel pada tahun 1820 ketika ia berpendapat *"that great compound of folly, weekness, prejudice, wrong feeling, right feeling, obstinacy, and newspaper paragraphs, which we called public opinion."*[5] Definisi ini menunjukkan bahwa definisi opini publik adalah beragam walau pada awalnya definisi opini publik cenderung bermakna negatif dan irrasional.

Untuk mendefinisikan opini publik, sebaiknya kita terlebih dulu mendefinisikan konsep opini dan publik. berdasarkan kepemilikannya, opini dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:[6]

---

[4] Dalam Michael Rush (1992). *Politics and Society: An Introduction to Political Sociology*. New York: Harvester-Wheatsheaf. p. 228.

[5] Lihat Daniel Katz, Dorwin Cartwright, Samuel Eldersveld & Alfred McClung Lee (1954). *Public Opinion and Propaganda*. New York: Henry Hold and Company. p. 7.

[6] Rush, *op. cit.*, p.168.

1. Opini ahli (*expert opinion*): pemilik opini merupakan ahli atau orang yang sangat paham dengan bidang yang berkaitan dengan opini publik.
2. Opini terinformasi (*informed opinion*): pemilik opini merupakan orang yang memiliki pengetahuan atau berkaitan dengan opini publik.
3. Opini terpengaruh (*affected opinion*): pemilik opini merupakan orang yang terpengaruh oleh isu atau masalah di dalam opini publik.
4. Opini publik secara umum (*public opinion at large*): siapa pun pemilik opini yang tidak terklasifikasi dalam tiga kategori sebelumnya.

Sedangkan untuk konsep publik, biasanya konsep ini dijelaskan sebagai oposisi biner terhadap konsep massa. Publik memiliki makna positif sementara massa bernuansa negatif dalam konteks proses komunikasi politik. Massa adalah sebuah istilah yang menggambarkan sekumpulan individu dalam jumlah yang sangat besar dan tanpa bentuk yang jelas. Massa teramati dalam perilaku dan ada di bawah pengaruh eksternal, dan dipandang oleh pihak lain termanipulasi atau tanpa identitas, bentuk organisasi kekuasaan, otonomi, integritas atau determinasi diri. Konsep ini merupakan salah satu perspektif dalam melihat audiens. Konsep ini biasanya memiliki konotasi negatif, seperti dalam istilah perilaku massa, budaya massa, dan tentu saja, amuk massa.[7]

Sedangkan makna dari publik cenderung berkonotasi positif. Setiap membicarakan publik dalam bahasa masyarakat awam, kita biasanya memikirkan publik dengan beragam cara. Ragam pemikiran tersebut di antaranya adalah adalah sebagai berikut:[8]

- Publik sebagai bukan privat, yang bermakna terbuka, dapat diobservasi dan diakses oleh pihak lain.

---

[7] Denis McQuail (2005) *McQuail's Mass Communication Theory*. Fifth Edition. London: Sage Publications. p. 560.

[8] Lawrence Grossberg, Ellen Wartella, D. Charles Whitney & J. Macgregor Wise (2006). *Media Making: Mass Media in A Popular Culture*. Second Edition. London: Sage Publications. p. 378.

- Publik sebagai sebentuk seluruh warga negara yang umum, relevan dan saling berkaitan, seperti dalam istilah kepentingan publik dan opini publik.
- Publik sebagai sesuatu yang komunal, dimiliki dan menjadi dasar aturan, seperti dalam kata penyiaran publik dan fasilitas publik.

Definisi publik sendiri dapat dianggap sebagai bentuk umum dari warga yang bebas dalam sebuah masyarakat tertentu atau dalam wilayah geografi yang lebih kecil. Konotasi konsep ini sangat dipengaruhi oleh teori- teori demokrasi, terutama berkaitan dengan kebebasan dan persamaan hak. Anggota dari publik dalam demokrasi yang murni bebas untuk berasosiasi, berinteraksi, berorganisasi dan berkekspresi untuk semua isu, dan akuntabilitas pemerintah semua tertuju pada "publik secara umum" berdasarkan prosedur yang disetujui bersama. Argumen inilah yang merupakan satu alasan komunikasi untuk publik harus melindungi dan menghormati demokrasi.[9]

Sementara definisi opini publik sendiri tidak dapat secara gampang merupakan penggabungan dari kata opini dan publik. Walau demikian, dengan mendefinisikan opini dan publik terlebih dahulu, kita akan mendapatkan setting pemikiran yang lebih terfokus.

Definisi opini publik adalah: *the complex of beliefs expressed by a significant number of persons on an issue of general importance.*[10] Definisi ini sejalan dengan definisi Burns yang mendefinisikan opini publik sebagai: *the distribution of individual preferences or evaluations of a given issue, candidate, or institution within a population. Distribution means the proportion of the population that holds a particular opinion, as compared to people with opposing opinions or those with no opinion at all.*[11]

Untuk memberikan aksentuasi pada fenomena opini publik kontemporer, salah satu definisi terbaru dari opini publik adalah sebagai berikut: *The collective views of significant part of any public. This part is sometimes*

---

[9] McQuail, *op. cit.*, p. 565.

[10] Bernard C. Hennessy (1970). *Public Opinion*. Second Edition. Wadsworth Publishing. p. 24-25.

[11] James MacGregor Burns, J.W. Peltason, Thomas E. Cronin & David B. Magleby (2001). *Government by the People*. New Jersey: Prentice Hall. p. 238

taken to mean a numerical majority as measured by polling, but this far overstates the capacity of the measuring instruments and misses the essential point that opinion is always diverse, dynamic and variable in strength. Historically and in certain contexts public opinion may be taken to refer to 'informed opinion', or the general view of the more educated and aware members of the society. No statement concerning public opinion is likely to be unambiguous or beyond dispute without some clear definition.[12]

Opini publik juga akan lebih jelas didefinisikan dengan mengurai berbagai elemennya. Sangatlah berguna untuk menjelaskan definisi tersebut dengan memahami dan menjelaskan berbagai elemennya, yang juga disebut sebagai faktor-faktor opini publik. Terdapat lima elemen atau faktor pembentuk opini publik. Kelima elemen atau faktor opini publik tersebut adalah sebagai berikut:[13]

Pertama, kehadiran sebuah isu (*presence of an issue*). Isu menempati elemen pertama dari opini publik. Setiap opini publik selalu berada di sekitar isu tertentu. Isu dapat didefinisikan sebagai sebuah situasi kontemporer di mana terdapat pertentangan atau memiliki kemungkinan besar menimbulkan kontroversi. Juga sangat relevan memikirkan isu sebagai pelibatan individu dalam wacana kontemporer, untuk membedakan opini dari hukum (kebijakan yang terkodifikasi) dan adat (sebagai pola perilaku tradisional). Isu harus berkaitan dengan kepentingan publik atau berkonsekuensi pada kehidupan orang banyak.

Kedua, karakter dasar publik (*the nature of publics*). Di dalam opini publik pasti terdapat sebuah kelompok atau individu-individu yang dapat dikenali, yang berkaitan dengan isu. Inilah yang disebut publik di dalam opini publik. Banyak jenis publik, tiap publik terdiri dari individu yang berkumpul karena terpengaruh oleh tindakan atau ide tertentu. Kemudian, setiap isu menciptakan publiknya sendiri, dan publik biasanya tidak terdiri dari individu yang sama yang membentuk berbagai publik tertentu yang lain. Umumnya setiap individu tertarik dengan suatu isu, dan berada di dalam berbagai opini publik yang beragam, yang relevan dengan praktek pemerintahan atau politik secara umum.

---

[12] Denis McQuail, *op. cit.*, p. 565.

[13] Hennessy, *op. cit.*, p. 25 – 30.

Berdasarkan posisinya terhadap suatu isu, publik dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu publik pro, kontra, dan netral. Publik netral bukanlah sekadar menunjukkan bahwa publik tersebut tidak berposisi pro atau kontra. Publik yang netral juga dapat berarti publik yang tidak mengetahui isu atau publik yang memilih tidak berposisi karena tidak berkaitan dengan isu. Publik akan bersikap ketika kondisi memaksa dan ketika isu telah memberikan konsekuensi secara langsung.

Ketiga, kompleksitas kepercayaan atau preferensi dalam publik (*the complex of beliefs in the publics*) atau seringkali disingkat dengan kompleks preferensi. Elemen ketiga ini merujuk pada totalitas opini pada isu oleh setiap anggota publik. Hal ini meliputi ide dari distribusi opini, begitu juga arah dan intensitasnya (untuk atau berlawanan dengan tindakan yang berkaitan dengan isu). Tetapi ekspresi kompleks preferensi juga bermakna lebih daripada sekadar arah dan intensitas; ini berarti semua opini tertentu yang dapat dibayangkan atau diukur yang dipegang oleh publik yang relevan dalam semua tipe mengenai isu melampaui di mana publik tersebut menjadi eksis.

Keempat, ekspresi opini (*the expression of opinion*). Faktor keempat adalah bagaimana opini publik diekspresikan atau dinyatakan. Kata-kata, baik yang diucapkan maupun yang tercetak, adalah bentuk yang lumrah dari opini publik. Walau demikian, bahasa tubuh juga merupakan bentuk ekspresi dari opini publik. Di dalam demonstrasi misalnya, kita akan mendapati teriakan, kepalan tangan, dan jenis penghormatan tertentu, yang juga merupakan ekspresi dari opini.

Tidak ada kesepakatan mengenai cara opini publik harus didefinisikan berkaitan dengan tipe ekspresinya. Paling tidak, terdapat dua jenis opini publik, yaitu opini publik internal dan opini publik eksternal. Bisa dianggap bahwa opini publik internal adalah opini publik yang tidak diekspresikan, sementara opini publik eksternal adalah opini publik yang diekspresikan.

Ekspresi opini publik sendiri sangat beragam, mulai dari demonstrasi sampai dengan diskusi di media massa, mulai dari perbincangan di warung kopi sampai dengan seminar di perguruan tinggi. Sejarah ekspresi opini publik juga setua perjalanan demokrasi dan peradaban manusia.

Secara lebih lengkap, sejarah ekspresi opini publik dapat dilihat di dalam tabel yang berasal dari Susan Herbst berikut ini:[14]

Teknik Ekspresi	Periode Kemunculan	Cara Publik Menyampaikan Opini Publik	Cara Pemerintah Mengetahui Opini Publik
Retorika/orator	Abad 5 SM	Berdebat, mengajukan gagasan	Pertemuan warga kota
Cetakan	Abad 16	Menyampaikan gagasan lewat buku atau barang tercetak	Buku, barang cetakan, selebaran
Kerumunan	Abad 17	Kampanye, menyampaikan gagasan di tengah massa	Tempat kampanye
Petisi	Akhir abad 17	Mengajukan petisi/usul	Parlemen
Salon	Akhir abad 17	Diskusi dengan orang lain	Hadir di salon
Coffehouse	Abad 18	Diskusi dengan orang lain	Hadir di *coffehouse*
Gerakan revolusi	Akhir abad 18	Demonstrasi, menumbangkan kekuasaan, kudeta	Aksi massa
Pemogokan	Abad 19	Boikot, mogok	Pemogokan
Pemilu	Abad 19	Ikut sebagai pemilih dalam pemilu	Hasil pemilu
Suratkabar modern	Pertengahan abad 19	Menulis di media massa	Membaca suratkabar
Surat untuk pejabat publik	Pertengahan abad 19	Mengajukan usul dan kritik pada pejabat	Surat protes
Straw vote	1990-an	Mengajukan pendapat pada *straw vote*	Hasil *straw vote*
Perencanaan agenda media massa (politik)	1920-1930-an	Liputan media massa	Tulisan di media
Sampel survei/ *polling*	1930-an	Responden sampel	Hasil *polling*

Sekarang ini *polling* menjadi bentuk ekspresi opini publik yang paling dirujuk untuk melakukan tindakan, kebijakan dan strategi politik oleh para aktor politik. Di dalam perkembangannya, ekspresi opini

[14] Dalam Eriyanto (1999). *Metodologi Polling: Memberdayakan Suara Rakyat*. Bandung: Remaja Rosdakarya. p. 5.

publik sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi yang semakin personal dan virtual. Individu dapat menyuarakan pendapatnya dengan lebih bebas walau kemudian kepemilikan dan perubahan opini publik juga mengalami perubahan berarti.

Faktor kelima atau terakhir dari opini publik adalah jumlah orang yang terlibat (*number of persons involved*). Faktor ini berarti ukuran atau dimensi publik yang tertarik dengan isu. Pertanyaan mengenai jumlah tersebut dapat digambarkan dalam pertanyaan sebagai berikut: berapa banyak individu dalam membentuk publik?

Tidak ada ahli yang dapat menentukan berapa banyak individu yang menentukan sebuah publik. Umumnya, publik dengan jumlah individu-lah yang dirujuk dalam setiap tindakan politik, tetapi beberapa kasus penting menunjukkan bahwa jumlah individu di dalam publik yang sedikit dapat mempengaruhi kompleks preferensi opini publik secara keseluruhan.

Secara implementatif, hal ini ditunjukkan dalam pelibatan tokoh penting, bisa tokoh publik atau selebriti, bagi sebuah kampanye. Mendekatkan seorang tokoh penting kepada publik tertentu dapat meningkatkan jumlah individu yang terlibat di dalam publik tersebut walau pada awalnya individu yang terlibat di publik tersebut hanya sedikit jumlahnya.

Polling: Pilar Kelima Demokrasi?

Sebenarnya tidak ada literatur yang secara langsung menyebutkan bahwa *polling* adalah pilar kelima demokrasi. Literatur berbahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa *polling* adalah pilar kelima demokrasi adalah buku *Metodologi Polling: Memberdayakan Suara Rakyat* karya Eriyanto. Menurut Eriyanto, muncul anggapan bahwa *polling* merupakan pilar terakhir dalam demokrasi di Amerika. *Polling* adalah pilar kekuatan kelima dari demokrasi (*the fifth estate*), setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers.[15] Hal ini karena begitu berpengaruhnya *polling* dalam proses demokrasi.

Sedemikian berpengaruhnya *polling* di Amerika Serikat sehingga proses politik yang ada seakan-akan telah diredusir menjadi sekadar

[15] Eriyanto, *op. cit.*, p. 30.

mengantisipasi isu politik belaka. Itu merujuk pada kecenderungan para politisi untuk mengorganisir aktivitas politik mereka hanya di seputar isu-isu yang menurut hasil *polling* merupakan permasalahan terpenting, ataupun sekadar mengemas berbagai isu tertentu yang dinilai secara politis menguntungkan, agar isu-isu tadi bisa tampil sebagai isu utama dalam pengumpulan opini publik.

Sebelum masuk lebih jauh ke dalam eksplanasi mengenai *polling*, sebaiknya kita mendiskusikan lebih dulu keempat pilar yang lain. Konsepsi tiga pilar dan pers sendiri sebenarnya adalah sebuah konsepsi klasik. Untuk mengamati perjalanan konsepsi pilar demokrasi kita dapat melacaknya dalam deskripsi Edward Burke berikut ini: Pada bulan Mei 1878, Louis XVI mengundang seluruh "Majelis Umum" mengadakan sidang di Versailles. Majelis Pertama terdiri atas tiga ratus kaum bangsawan. Mejelis Kedua, tiga ratus kaum rohaniwan. Majelis Ketiga, enam ratus rakyat jelata. Beberapa tahun kemudian, sesudah Revolusi Perancis, Edmund Burke memandangi Galeri Pers Majelis Rendah dan berkata, "Di sanalah Majelis Keempat. Dan itu lebih penting daripada majelis-majelis lainnya."[16] Hal ini menunjukkan bahwa peran pers bebas begitu dominan dalam demokrasi kontemporer.

Pers sendiri memiliki dua makna yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti sempit adalah media cetak dan hanya terfokus pada profesi wartawan, sementara pers dalam arti luas meliputi semua jenis media dan tidak hanya terfokus pada profesi wartawan, melainkan semua profesi di media yang berkaitan dengan berita, termasuk kolumnis dan fotografer.[17] Kesamaan kedua definisi tersebut, dalam arti sempit ataupun luas, adalah pers hanya berkaitan dengan pesan faktual dari media atau berita.

Sebenarnya yang dimaksud dengan pers sebagai pilar keempat adalah ketika pers menjalankan fungsinya sebagai mata publik, seperti pendapat berikut ini: *fourth Estate has referred to "the public press" since at least as far back as the early 1800s. More generally, it has also been used to refer to any group other than the clergy, nobility, or commons that wields political po-*

[16] http://nie.brownsvilleherald.com/newspaperterms.htm, diakses tanggal 3 Mei 2008.

[17] http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn?s=fourth%20estate, diakses tanggal 3 Mei 2008.

wer.[18] Berdasarkan argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa bila pers hanya menjalankan fungsinya secara bisnis, pers dapat dianggap tidak menjalankan fungsi pilar keempat ini.

Di dalam perkembangannya, melihat keempat pilar belum dapat mewakili proses politik yang demokratis maka dimunculkanlah pilar kelima. Pilar kelima didefinisikan sebagai *any class or group in society other than the clergy (First Estate), the nobility (Second Estate), the middle class (Third Estate), and the press (Fourth Estate). It has been used to describe trade unions, the poor, organized crime, German propaganda and spies during World War II (by the French). It can also be used to describe media that secs itself in opposition to mainstream (Fourth Estate) media.*

Pilar kelima yang lain adalah para pengamat politik. Sementara menurut Dan Nimmo, pilar kelima adalah bloggers, menurut Stephen D. Cooper, bahkan media penyiaran, menurut jurnal *Boradcasting* di Amerika.[19] Kesimpulan dari beberapa pendapat tersebut adalah: pilar kelima merupakan wakil dari publik. Tetapi bagaimana mengamatinya? Karena publik adalah sesuatu yang cair dan berformat tidak terstruktur secara baku. Ekspresi opini publik yang empiris atau *polling* dapat dianggap mewakili apa yang kita anggap sebagai pilar kelima walau konsepsi ini bukan tanpa kelemahan konseptual.

Kelemahan menggunakan konsepsi pilar dalam demokrasi, baik itu empat pilar ataupun lima pilar, adalah menempatkan pilar lain dalam perpanjangan negara. Kita mesti ingat pada dasarnya pilar lain tetaplah hanya berfungsi sebagai pelengkap bagi legislatif, yudikatif dan eksekutif. Konsepsi ini pun berasal dari abad Pertengahan Eropa padahal kehidupan politik kontemporer jauh lebih kompleks di mana semua aktor politik bersifat cair dan berwajah ganda.

Bila kita menempatkan *polling* sebagai pilar kelima, yang berarti menempatkannya sebagai perluasan dari peran negara, bagaimana dengan esensi opini publik sebagai ekspresi suara masyarakat? Ada kontradiksi dalam konsepsi pilar kelima tersebut. Hal yang paling kontributif adalah mencari konsepsi baru untuk *polling* agar benar-benar menempatkannya sebagai milik masyarakat, bukan negara.

---

[18] http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Estate diakses tanggal 3 Mei 2008.
[19] http://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_Estate diakses tanggal 3 Mei 2008.

Untuk mengembalikan *polling* sebagai manifestasi suara masyarakat, sebaiknya kita mengembalikan *polling* pada pengertiannya yang esensial, yaitu sebagai salah satu bentuk ekspresi opini publik. Bagaimanapun juga, bila melihat telaah referensi lima pilar, bisa dikatakan publik adalah elemen terpenting yang justru terlupakan dalam demokrasi. Kita telah menemukan sebenarnya sebuah konsep yang mewakili suara masyarakat: opini publik. Opini publik baru dapat dipahami dan dianalisis bila opini publik tersebut diekspresikan melalui beragam cara, bisa melalui diskusi terbuka, debat di media massa, demonstrasi, dan melalui *polling*. *Polling*, sejauh ini, merupakan bentuk ekspresi yang paling bisa dirujuk karena bersifat empiris.

Polling adalah sebuah kuantifikasi sebagian dari beberapa aspek yang disuarakan oleh masyarakat mengenai berbagai isu yang ditanyakan kepada mereka. Berbagai pernyataan tersebut direkam dan dihitung, mirip dengan voting, dan individu juga dianggap mewakili publik secara keseluruhan.[20] Hasil yang dicapai oleh *polling* seringkali mengejutkan karena ekspresi opini yang sangat terbatas melalui sampel dapat memprediksi secara akurat tindakan masyarakat.

Polling mengubah ekspresi opini publik yang rumit, kompleks dan melibatkan diskusi menjadi hanya pada jawaban ya – tidak dan persentase dari publik pro, kontra, dan netral atau tidak tahu. Sekaligus, jawaban singkat dari responden tadi menjadi simbolisasi dari hal yang lebih luas, misalnya jawaban tidak dari sebuah isu mengenai kenaikan harga BBM dapat disimbolisasi sebagai penolakan terhadap rejim secara keseluruhan.

Polling juga mengubah definisi mengenai partisipasi publik untuk selamanya. Publik menjadi sesuatu yang abstrak dan jauh, bukan sesuatu yang konkret dan dapat memberikan pengaruh secara langsung dan fisikal. Hal ini juga mengubah opini publik dari perilaku ke sikap. *Polling* adalah opini publik yang diekspresikan dengan menyatakan pendapat terhadap suatu isu.

Melalui *polling* persetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap suatu isu atau kebijakan diwujudkan dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti atau penyelenggara *polling*. Karena itu hasil ekspresi opini publik yang disampaikan melalui *polling* berupa sikap

---

[20] William Albig (1956). *Modern Public Opinion*. New York: McGraw-Hill. p. 198.

atau opini. Sementara ekspresi opini publik dengan cara lain, semisal demonstrasi, mengajukan petisi dan boikot adalah ekspresi opini yang berupa perilaku atau tindakan. Bentuk ekspresi opini publik yang ekstrem adalah melalui kudeta dan penggulingan kekuasaan.

Terakhir, *polling* semakin menunjukkan bahwa ekspresi opini publik semakin bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Walau belakangan ditemukan cara menganalisis opini publik dengan analisis *framing* dan analisis wacana, dua metode ini belum lazim digunakan dibandingkan metode survey yang jauh lebih mapan.

Di atas sebuah perubahan tersebut, *polling* dapat membantu meningkatkan efisiensi demokrasi karena dengan menguraikan opini dari publik, pemerintah dapat membuat suatu formulasi kebijakan sesuai dengan yang diharapkan dan dipikirkan oleh publik. Kebijakan yang didasarkan pada opini seseorang tidaklah memberikan informasi yang cukup, karena itu lebih bijaksana bila menyertakan opini banyak orang dalam merumuskan suatu kebijakan.

Polling menyediakan publik keputusan politik bagi para pembuat kebijakan. Dalam hubungan ini, *polling* adalah sarana pengakuan pendapat masyarakat diakui. *Polling* dapat menyediakan basis bagaimana kebijakan publik itu harus dibuat yang disesuaikan dengan keinginan publik. Tentu saja kompleksitas dari suatu isu tidak dapat ditangkap oleh *polling* sepenuhnya, berbeda dengan forum diskusi publik dan dengar pendapat. Kelebihannya melalui *polling*, opini masyarakat dapat dideskripsikan dan diimplementasikan menjadi lebih obyektif.

Matinya Komunikasi Politik dan "Manipulasi" Opini Publik

Opini publik dalam konteks proses komunikasi politik adalah bagian yang memperkuat peran masyarakat. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, proses komunikasi politik menjadi lebih mudah, efektif, dan berlangsung dengan cepat. Sayangnya, proses tersebut telah mematikan proses komunikasi politik yang esensial, yaitu memberikan suara masyarakat sebagai elemen terpenting dalam proses politik. Pada akhirnya, opini publik hanya sekadar menjadi "pengesahan" pengambilan kebijakan oleh penguasa tanpa menangkap apa pun yang esensial dari masyarakat itu sendiri.

Sebelum kita mendiskusikan "kematian" komunikasi politik dan manipulasi opini publik, terlebih dulu akan dijelaskan definisi komunikasi politik dan mengapa di era kontemporer seperti sekarang justru proses komunikasi politik mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum dan publik secara spesifik.

Brian Mc Nair memberikan definisi komunikasi politik melalui interaksi elemen-elemen pembentuknya, yaitu: organisasi politik, masyarakat (*audience*), dan media. Organisasi politik terdiri dari: partai politik, organisasi publik, kelompok kepentingan, dan organisasi teroris.[21] Idealnya, proses komunikasi yang sehat menyeimbangkan interaksi antara organisasi atau aktor politik dengan masyarakat atau publik. Media menjadi institusi penengah dan berperan senetral mungkin. Kenyataannya, media lebih banyak menjadi alat bagi aktor politik dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Tujuan dari proses komunikasi politik adalah sebagai berikut: [22]

1. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan di bawah koordinasi politisi dan aktor politik yang lain untuk tujuan mencapai tujuan-tujuan spesifik.
2. Komunikasi yang ditujukan untuk para aktor politik oleh non-politisi seperti para pemilih dan kolumnis media cetak.
3. Komunikasi tentang para aktor tersebut dan aktivitasnya, seperti yang termuat di dalam laporan berita, editorial, dan berbagai bentuk lain diskusi politik.

Memahami relasi empiris antara pesan yang termediasi dan kesiapan dan perilaku politis sangatlah penting, tetapi juga penting untuk memahami beberapa factor lain dari lingkungan komunikasi politik yang lebih luas seperti: [23]

1. Jangkauan atau keberagaman informasi dan sumber informasi

---

[21] Brian McNair (2003). *An Introduction to Political Communication*. 3rd Edition. London: Routledge. p. 5-14.

[22] McNair, *op, cit.*, p. 4.

[23] W. Lance Bennett & Robert M. Entman (ed.) (2001). *Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press. p. 6

2. Frekuensi beragam isu dan tema
3. Format tempat informasi yang relevan secara politis dipresentasikan, termasuk kedalaman atau detail dari presentasi, bekerjanya gaya tabloid dan hiburan, dan penggunaan relatif dari narasi, analisis, dan ideologi
4. Keseimbangan antara identitas sosial yang luas dan identitas personal yang sempit dalam bingkai pesan
5. Ragam cara di mana anggota dari publik terlibat dengan dan mengkomunikasikan reaksi mereka pada pesan politis yang mereka terima dari media

Mengapa kemudian komunikasi politik kontemporer menuju pada kematian atau bahkan telah mati dan mengapa opini publik termanipulasi? Elemen-elemen komunikasi politik tidak lagi menjalankan fungsinya dengan tepat dalam proses komunikasi politik terutama karena rentannya media dari kekuatan ekonomi dan politik dari para aktor politik yang sekaligus merupakan aktor ekonomi. Hal ini menyebabkan media massa tidak dapat menjalankan fungsinya dengan optimal untuk masyarakat.

Media massa berkelindan dengan negara dan industri, tidak lagi menjadi anjing penjaga melainkan menjadi anjing piaraan, bahkan anjing sirkus. Walaupun media dikenal sebagai salah satu utama dalam penghancur reputasi aktor politik, media juga dikenal sebagai salah satu elemen "penghancur" masyarakat. Hampir semua media massa tidak bersifat politis, beberapa media lebih politis dari yang lain, audiens juga tidak ingin media terlalu politis.[24]

Media massa mampu melakukan priming yaitu menjadikan masyarakat merujuk pada media dalam menawarkan nilai dan standar di mana obyek perhatian media ditentukan. Asal dari istilah ini terdapat dalam psikologi sosial (teori sosialisasi) tetapi kemudian istilah ini lebih diaplikasikan pada komunikasi politik sampai pada evaluasi figur politik oleh opini publik.[25] Peran media yang lain adalah melakukan framing atau pembingkaian terhadap sebuah peristiwa. Istilah kedua ini lebih halus daripada istilah yang pertama.

---

[24] Hennessy, *op. cit.*, p. 308-309.

[25] McQuail, *op. cit.*, p. (2005): 564.

Kasus Indonesia misalnya, media massa yang di awal Reformasi menjadi institusi yang penting bagi proses komunikasi politik. Semakin panjang umur Reformasi peran media semakin lemah ketika berhadapan dengan aktor politik karena kegagalan seluruh elemen bangsa menyusun aturan main yang tegas dan jelas bagi media dalam proses komunikasi politik, terutama aturan main yang dimanifestasikan dalam undang-undang.[26] Kelalaian tersebut menyebabkan media massa cenderung tidak berpihak ke masyarakat sekarang ini. Media massa telah gagal mengambil momentum dan turut berperan dalam membentuk transisi politik semu.

Bisa dikatakan, aktor-aktor politik adalah yang paling diuntungkan dalam perkembangan komunikasi politik kontemporer. Aktor politik paling dominan pemerintah mampu membentuk sistem politik yang tidak memadai, terutama melalui regulasi yang diciptakannya. Hal ini dengan mudah dapat dilihat melalui peraturan pemerintah yang cenderung mementahkan ekspektasi masyarakat pada masa awal Reformasi.

Hampir semua aktor politik yang lain, terutama organisasi teroris, cenderung menggunakan propaganda daripada persuasi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak dengan mudah menjadi publik yang cerdas berposisi terhadap isu. Bagaimana pun beragamnya kompleks preferensi, hal tersebut baik bagi demokrasi. Propaganda dapat menghancurkan idealisme terciptanya publik yang cerdas karena pesan politik dimanipulasi melalui propaganda.

Propaganda adalah proses dan produksi upaya yang terencana untuk mempengaruhi opini dan perilaku kolektif dengan menggunakan wahana komunikasi yang beragam yang sistemik dan satu-sisi. Propaganda membawa kepentingan sumber atau pengirim, bukan penerima pesan. Bisa dipastikan bahwa proses propaganda adalah pembelokan makna pesan, penyampaian pesan yang tidak sepenuhnya benar dan mungkin seluruhnya tidak benar. Propaganda juga secara psikologis dapat bersifat agresif dan terdistorsi dalam merepresentasikan realitas. Efektivitas propaganda sendiri beragam, tergantung dari konteks dan kesiapan target audiens lebih dibandingkan karakteristik "pesan". [27]

---

[26] Lebih jauh lihat Wisnu Martha Adiputra (2002). *Negara, Pers dan Transisi Politik: Interaksi antara Negara dan Pers pada Masa Transisi Politik di Indonesia 1998 – 1999.* Thesis Program Studi Ilmu Politik UGM: Belum Dipublikasikan.

[27] McQuail, *op. cit.*, p. 564-565.

Definisi propaganda sendiri sangatlah beragam. Seperti halnya berbagai istilah akademis yang lain, cara terbaik untuk memahami propaganda adalah dengan memahami elemen pembentuknya. Elemen-elemen propaganda adalah sebagai berikut:[28] retorika, mitos, dan simbol, yang sering juga disebut sebagai trinitas propaganda (*the trinity of propaganda*), ditambah dengan manupulasi dan pembelokan konstruksi sosial.

Elemen komunikasi politik yang terakhir dan yang terpenting adalah masyarakat. Sayangnya, masyarakat atau publik selalu menjadi pihak yang dirugikan. Rasionalitas masyarakat cenderung diabaikan oleh aktor politik dan media. Pemanfaatan propaganda oleh aktor politik dan media massa yang menganggap publik audiensnya sebagai konsumen, bukannya sebagai warga masyarakat.

Melalui kedua jenis manipulasi tersebut, telah terjadi pembentukan opini publik yang "direkayasa". Proses komunikasi politik secara umum lebih menguntungkan organisasi media dan aktor politik bukannya masyarakat. Masyarakat yang terpisah dalam beragam publik cenderung diabaikan.

Sebenarnya, secara inheren pun, pembentukan opini publik di masyarakat bisa tidak semudah dan seideal yang dibayangkan. Terdapat dua hal yang cenderung menyebabkan pembentukan opini publik tidak natural. Artinya pembentukan opini tersebut tidak sepenuhnya berjalan secara rasional. Kedua hal tersebut adalah keberadaan pemuka opini (*opinion leader*) dan fenomena spiral kesunyian (*spiral of silence*).[29]

Walau sepintas peran pemuka opini positif bagi proses politik, terutama di negara-negara berkembang, pada kenyataannya pemuka opini dapat berperan sebaliknya. Pemuka opini dapat memanipulasi opini publik dengan melakukan obyektifitasi dan rasionalisasi. Obyektifikasi berarti menganggap opini personal si pemuka pendapat sebagai opini publik, sedangkan rasionalisasi adalah pembenaran oleh pemuka opini kepada pengikutnya walaupun bisa jadi opini publik tersebut tidak sesuai dengan kebenaran. Obyektifikasi dan rasionalisasi lumrah terjadi, hal ini terlihat dengan mudah pada aktor politik yang selalu mengatasnamakan kepentingan publik.

---

[28] Nicholas Jackson O'Shaughnessy (2004). *Politics and Propaganda: Weapon of Mass Seduction*. Ann Arbor: The University of Michigan Press. p. 4 – 7.

[29] McQuail, *op. cit.*, p. 563.

Aspek yang lain adalah keberadaan spiral kesunyian (*spiral of silence*) yang menyebabkan anggota masyarakat tidak berani mengekspresikan opininya, sekalipun ekspresi yang anonim seperti *polling*. Spiral kesunyian adalah konsep yang mendeskripsikan sebuah versi dari efek pihak ketiga (*third party*) dalam pembentukan opini publik. Sebuah efek yang menyebabkan opini publik menjadi tetap terpendam dan tidak diekspresikan atau tetap menjadi opini publik internal.

Terdapat kecenderungan bagi individu untuk dipengaruhi sesuatu yang mereka pikirkan (atau lakukan) atau oleh apa yang mereka pikir dipikirkan oleh orang lain. Istilah ini pertama-kali diaplikasikan oleh Elizabeth Noelle-Neuman untuk merujuk pada kecenderungan untuk siapa pun yang berpikir mereka memegang pandangan minoritas atau berbeda untuk mengulang atau menyampaikan ekspresi pandangan tersebut ke publik, kemudian hal ini secara sirkular atau berulang memperkuat dominasi dari konsensus yang diharapkan terjadi (*the spiraling effects*) oleh pihak tertentu. Hipotesis ini berasal dari sebuah asumsi "ketakutan atas isolasi" tak terlihat dari penguasa.

Fokus utama dari konsep ini berkaitan dengan konsep lain yang dikenal yaitu: "*bandwagon effect*", di mana publik mudah dipengaruhi oleh pihak yang menarik perhatian dengan intens.[30] Sekelompok kecil orang yang melakukan demonstrasi dengan radikal atau "membajak" media dalam sebuah pemberontakan politik dapat dianggap mewakili opini publik mayoritas. Masyarakat yang tidak memahami isu dan tidak memiliki akses terhadap media dapat dengan mudah dipengaruhi oleh spiral kesunyian dan turunannya, efek *bandwagon*.

Catatan Akhir: Memahami Demokrasi Indonesia melalui Opini Publik

Pertanyaan terakhir dari tulisan ini adalah bagaimana memahami *polling* sebagai salah satu elemen penting bagi demokrasi di Indonesia? Jawabannya bisa agak singkat: dengan melihat realitas komunikasi politik di Indonesia. Dengan melihat fenomena komunikasi politik di Indonesia, kita dapat melihat bahwa *polling* belum terlalu berperan signifikan dan cenderung dimaknai secara salah kaprah.

---

[30] McQuail, *op. cit.*, p. 568.

Di Indonesia *polling* sekarang ini memang hanya mempunyai pengaruh yang terbatas dibandingkan dengan bentuk ekspresi opini publik yang lain, semisal demonstrasi dan pemogokan. Demonstrasi dan pemogokan akan dilaporkan lebih besar oleh media dibandingkan dengan hasil *polling*, begitu juga dengan opini para pemimpin masyarakat. Hasil *polling* lebih dianggap sebagai pelengkap dalam pemberitaan media massa.

Pada gilirannya, aktor-aktor politik beranggapan bahwa *polling* atau ekspresi opini publik yang empiris bukanlah hal yang penting untuk memutuskan kebijakan atau strategi politik. Kebijakan dan strategi politik kemudian disusun tidak berdasarkan telaah opini publik yang mendalam sehingga tetap merugikan masyarakat. Bisa jadi, kebijakan dan strategi politik yang telah diciptakan kemudian ditolak oleh sebagian besar masyarakat.

Selain itu, penyebab mengapa *polling* masih kurang berpengaruh di Indonesia adalah karena opini publik seringkali dianggap sebagai pendapat kelompok masyarakat yang abstrak sehingga tidak menakutkan bagi pemerintah atau aktor politik yang lain.Hal ini berbeda dengan demonstrasi, pemogokan dan pengerahan massa di mana kumpulan orang tersebut konkret dan memiliki pengaruh yang besar secara langsung. Dengan demikian, hasil *polling* jarang menjadi headline dari sebuah berita. Pernyataan tokoh masyarakat atau *public figure* masih lebih dianggap penting oleh sebagian besar media massa Indonesia dibandingkan dengan hasil *polling*. Pemuka opini lebih disukai oleh media massa Indonesia karena mendapatkan perhatian langsung dari aktor-aktor politik.[31]

Penyebab lainnya mengapa peran opini publik belum signifikan dalam proses komunikasi politik Indonesia adalah para aktor politik Indonesia salah kaprah memahami penerapan opini publik dan *polling* dalam proses komunikasi politik. Kesalahkaprahan itu adalah terlalu mendewakan hasil *polling*, tidak adanya organisasi penyelenggara *polling* yang dihormati oleh banyak pihak, dan mengidentikkan organisasi media massa sebagai penyelenggara *polling*.

Kesalahkaprahan pertama adalah terlalu berlebihan memaknai hasil *polling* padahal *polling* adalah salah satu bentuk ekspresi dari opini publik dan pada dasarnya opini publik mudah berubah oleh sebuah peris-

[31] Eriyanto, *op. cit.*, p. 44.

tiwa drastis, apalagi di tengah masyarakat yang mudah lupa atau belum memahami proses diskusi. Hal ini mudah diamati melalui tokoh politik yang cenderung menyalahkan hasil *polling* yang memprediksi akibat kebijakan politik.

Hasil *polling* tentu bukanlah sebuah kesimpulan yang absolut, melainkan hanya perkiraan atau hanya mendekati kebenaran. Itulah sebabnya, di dalam *polling* dikenal apa yang disebut dengan "peluang untuk salah" dan tindakan yang berhati-hati dalam melaksanakan *polling* sangat mirip tindakan yang terstruktur dalam bidang akademis.

Kedua, belum adanya lembaga pelaksana *polling* yang cukup dihormati dan mapan secara historis seperti Gallup Poll di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh proses komunikasi politik modern yang baru berlaku di Indonesia, baru sekitar sepuluh tahun. Akibatnya, setiap kelompok merasa bisa melakukan *polling* padahal tidak dibekali oleh kemampuan melakukan riset yang baik dan "terlalu dekat" dengan aktor politik. Akibat lanjutannya adalah adanya anggapan bahwa hasil *polling* bisa dipesan oleh pihak tertentu dan hasil *polling* tidak netral.

Salah kaprah yang terakhir adalah menganggap organisasi media massa sebagai institusi penyelenggara *polling*. Hal ini masih berkaitan dengan salah kaprah kedua, karena belum hadirnya lembaga jajak opini yang kredibel di Indonesia. Media massa memang bisa melakukan *polling* untuk kepentingan pemberitaannya tetapi *polling* bukanlah aktivitas media massa yang utama.

Selain itu, masyarakat Indonesia terbiasa melihat bahwa media massa Indonesia cenderung tidak netral atas dasar kepemilikan dan ideologi. Misalnya saja, sebuah media cetak besar berskala nasional tidak bisa terlalu mendalami isu-isu Islam karena media tersebut diidentikkan memiliki ideologi tertentu. Dengan demikian, media massa di Indonesia tidak dengan mudah mengamati semua isu politik.

Lalu, bagaimana menjadikan opini publik dan ekspresinya secara empiris (*polling*) berdaya guna bagi proses komunikasi politik, atau secara luas politik, di Indonesia? Polling akan sangat berperan jika sistem pemilihan para anggota legislatif dan eksekutif dilakukan secara langsung Atau secara umum sistem politik yang lebih terbuka akan menyebabkan *polling* semakin berperan. Sistem politik yang terbuka juga menyebabkan masyarakat dapat mengakses dan mendistribusikan informasi dengan

bebas, serta menjadikan masyarakat dapat mengekspresikan opininya secara terbuka.

Paling tidak bangsa Indonesia telah memiliki pemilihan pemimpin secara langsung, pengakuan atas kebebasan memperoleh informasi bagi warga negara dan kebebasan pers bagi pelaku media walau belakangan kedua hal terakhir mulai mengecil keran kebebasannya. Ketiga modal tersebut adalah awal yang baik bagi kontribusi *polling* yang semakin penting di masa mendatang.

Selanjutnya, saran yang bisa diberikan untuk memperkuat kontribusi *polling* dalam politik Indonesia adalah dengan memberikan porsi yang besar bagi media untuk menjalankan fungsi idealisnya: mengawasi penguasa dan memberikan informasi yang benar kepada publik. Kemudian, bagi aktor politik tidak lagi diperbolehkan melakukan propaganda terlalu banyak. Para tokoh politik harus mengedepankan penggunaan persuasi yang rasional untuk mempengaruhi publik. Terakhir adalah untuk masyarakat, yang dalam konteks opini publik akan tersebar menjadi beragam publik dalam tiap isu. Masyarakat diberikan kebebasan mengakses dan mendistribusikan informasi agar proses diskusi publik berjalan dengan baik dan kebenaran relatif didapatkan. Pada gilirannya kebijakan politik yang diambil akan selalu mempertimbangkan opini publik yang berkembang.

Akhirnya, *polling* dapat menjadi sarana yang tepat untuk memahami masyarakat dengan mengamati setiap isu dan publik dengan bijak dan mendalam. Dengan mendedah kompleks preferensi, kebijakan dan strategi politik yang tepat dapat disusun dan proses komunikasi politik yang sehat dapat dibangun. Pada dasarnya *polling* hanyalah sarana. Hal yang terpenting dari semuanya adalah menempatkan suara masyarakat sebagai elemen terpenting bagi demokrasi melalui *polling*. Bukankah suara masyarakat adalah suara Tuhan?*****

Daftar Pustaka

Adiputra, Wisnu Martha (2002). *Negara, Pers dan Transisi Politik: Interaksi antara Negara dan Pers pada Masa Transisi Politik di Indonesia 1998 – 1999*. Thesis Program Studi Ilmu Politik UGM: Tidak Dipublikasikan.

Albig, William (1956). *Modern Public Opinion*. New York: McGraw-Hill.

Bennett, W. Lance & Robert M. Entman (ed.) (2001). *Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Burns, James MacGregor, J.W. Peltason, Thomas E. Cronin & David B. Magleby (2001). *Government by the People*. New Jersey: Prentice Hall.

Eriyanto (1999). *Metodologi Polling: Memberdayakan Suara Rakyat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Forrester, Geoff (ed.) (1999). *Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos*. Singapore: ISEAS.

Grossberg, Lawrence, Ellen Wartella, D. Charles Whitney & J. Macgregor Wise (2006). *Media Making: Mass Media in A Popular Culture*. Second Edition. London: Sage Publications.

Hennessy, Bernard C. (1970). *Public Opinion*. Second Edition. Wadsworth Publishing.

Katz, Daniel, Dorwin Cartwright, Samuel Eldersveld & Alfred McClung Lee (1954). *Public Opinion and Propaganda*. New York: Henry Hold and Company.

McNair, Brian (2003). *An Introduction to Political Communication*. 3rd Edition. London: Routledge.

McQuail, Denis (2005). *McQuail's Mass Communication Theory*. Fifth Edition. London: Sage Publications.

O'Shaughnessy, Nicholas Jackson (2004). *Politics and Propaganda: Weapon of Mass Seduction*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Rachman, M. Fajroel. (2008). 'Selamat Tinggal Reformasi 1998.' *Kompas*, Selasa 13 Mei 2008.

Rush, Michael (1992). *Politics and Society: An Introduction to Political Sociology.* New York: Harvester-Wheatsheaf.

Situs

http://en.wikipedia.org

http://nie.brownsvilleherald.com

http://wordnet.princeton.edu